

**PERSIAPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015: KEBIJAKAN
PEMBEBASAN ALIRAN PENANAMAN MODAL ASING**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Dina Fitria Marta Sari
115020407111045**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul:

PERSIAPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015: KEBIJAKAN PEMBEBASAN ALIRAN PENANAMAN MODAL ASING

Yang disusun oleh:

Nama : Dina Fitria Marta Sari
NIM : 115020407111045
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 3 Juni 2015.

Malang, 15 Juni 2015

Dosen Pembimbing,

Dr.Iswan Noor, SE., ME.

NIP. 19590710 198303 1 004

**PERSIAPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENUJU
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015: KEBIJAKAN PEMBEBASAN ALIRAN
PENANAMAN MODAL ASING**

Dina Fitria Marta Sari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya[#]
Email: dinafitriamarta@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persiapan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui kebijakan pembebasan aliran PMA menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Berdasarkan studi literatur, ditetapkan 14 determinan yang terkait dengan pembebasan aliran PMA yaitu: Kebijakan PMA, proses perizinan dalam memulai bisnis, insentif investasi, fasilitas infrastruktur, promosi, national treatment, perlindungan Intellectual Property Rights, tarif pajak, tingkat korupsi yang rendah, kualitas birokrasi, Kawasan Ekonomi Khusus, kebijakan lingkungan, dan penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan metode scoring untuk mengetahui peringkat yang diperoleh Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur belum siap menuju MEA 2015 dengan perolehan skor 71,40 persen. Hal ini disebabkan karena dari 14 determinan yang ditetapkan, Provinsi Kalimantan Timur hanya memenuhi 10 determinan. Berikut ini 4 determinan yang belum dipenuhi Provinsi Kalimantan Timur: (1) Insentif investasi, (2) Fasilitas infrastruktur, (3) Perlindungan Intellectual Property Rights, dan (4) Tingkat korupsi yang rendah.

Kata kunci: Kebijakan, Penanaman Modal Asing, MEA 2015.

A. PENDAHULUAN

Gagasan ASEAN *Economic Community* pertama kali diusulkan oleh Perdana Menteri Singapura Goh Chok Tong dalam ASEAN Summit di Phnom Penh, Cambodia. ASEAN Summit di Bali pada tahun 2003, menghasilkan keputusan para pemimpin ASEAN untuk membentuk ASEAN *Economic Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2020. MEA merupakan salah satu dari tiga pilar ASEAN *Vision 2020*, bersamaan dengan ASEAN *Security Community* (ASC) dan ASEAN *Socio-Cultural Community* (ASCC) (Hew & Soesastro, 2003).

MEA adalah tujuan akhir integrasi ekonomi seperti yang diuraikan dalam ASEAN *Vision 2020*. Pada 12th ASEAN Summit 2007 di Singapura memutuskan untuk mempercepat pembentukan MEA menjadi 2015 guna memperkuat daya saing ASEAN dalam menghadapi kompetisi global dari China dan India. Terutama dalam hal menarik investasi asing (Arifin et.al, 2008:11; Plummer, 2006 dan Kompas, 2014).

Tujuan MEA adalah mencapai target pembentukan pasar tunggal dan basis produksi, dengan upaya meniadakan hambatan pergerakan komoditas dan faktor produksi, serta harmonisasi kebijakan. Konsekuensi pencapaian target MEA menyebabkan dampak terhadap perekonomian yang ditandai dengan liberalisasi ekonomi di kawasan ASEAN. Interaksi barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja secara bebas tanpa ada hambatan (Arifin et.al, 2008:11; Kompas, 2014; Llanto & Navarro, 2012; dan Majalah Tempo, 2014).

GDP (*Gross Domestic Product*) merupakan ukuran utama bagi aktivitas perekonomian nasional yang memiliki empat komponen pengeluaran: Konsumsi (C), Investasi (I), Pembelian pemerintah (G), dan Ekspor bersih (X-M). Menurut teori ekonomi, investasi berkorelasi positif terhadap GDP sehingga jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka pertumbuhan investasi akan meningkat (Mankiew, 2003).

Menurut Nopirin (2012:103) modal asing merupakan sumber pertumbuhan ekonomi suatu negara. Manfaat modal asing adalah menutup kekurangan modal domestik, meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran, serta meningkatkan devisa negara melalui peningkatan dalam ekspor (Satria & Wulandari, 2011). Oleh karena itu, dibutuhkan liberalisasi investasi sebagai penunjang kelancaran aliran modal asing.

Liberalisasi investasi bertujuan untuk mewujudkan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka dan kompetitif bagi investasi. ACIA (*ASEAN Comprehensive Investment Agreement*) sebagai instrumen ekonomi untuk mewujudkan integrasi regional, guna terciptanya lingkungan investasi

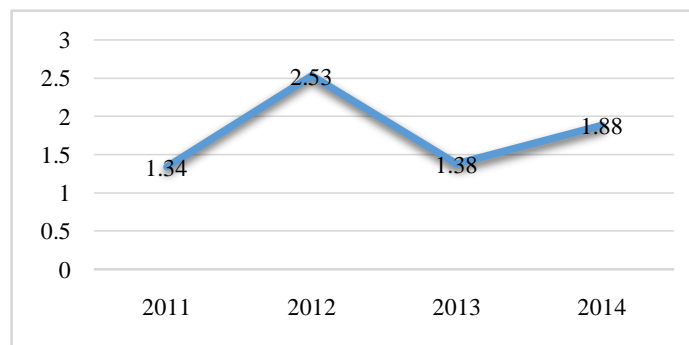
yang bebas, transparan, dan kompetitif di kawasan ASEAN (Arifin et.al, 2008:179; ASEAN Secretariat, 2014).

Setiap negara di ASEAN memiliki keunggulan komparatif paling tidak pada satu faktor prioritas (Oktaviani et.al dalam Arifin et.al, 2008:83). Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan Asia Tenggara, sumber daya alam dan mineral yang melimpah merupakan keunggulan komparatif yang dimiliki negara Indonesia. Pulau Kalimantan terdiri dari 5 provinsi (Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara) merupakan salah satu kepulauan di Indonesia yang memiliki sumber daya alam dan mineral yang melimpah.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki kepadatan penduduk yang relatif rendah dan terkenal dengan kekayaan sumber daya alam dan mineral, sehingga industri pertambangan maju pesat dan berdampak pada sumber pendapatan daerah kota/kabupaten di provinsi tersebut (Kementerian Keuangan, 2014). Selain sektor pertambangan, pada sektor perkebunan dikenal sebagai produsen kelapa sawit (BPPMD Kaltim, 2014).

Keunggulan komparatif yang dimiliki Provinsi Kalimantan Timur membawa pengaruh pada pertumbuhan investasi asing yang menunjukkan kepercayaan dunia usaha untuk menanamkan modal di provinsi ini. Menurut BPPMD Provinsi Kalimantan Timur, pertumbuhan realisasi PMA di Kaltim dari tahun 2011 hingga 2014 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 1. Pertumbuhan Realisasi PMA di Kalimantan Timur



Sumber : BPPMD Provinsi Kalimantan Timur, 2014

Data pada grafik di atas menggambarkan pertumbuhan realisasi PMA di Provinsi Kalimantan Timur, tahun 2011 ke 2012 mengalami peningkatan sebesar US\$ 1,19 miliar. Tahun 2013 mengalami penurunan menjadi US\$ 1,38 miliar akibat devaluasi mata uang. Kemudian, di tahun 2014 kembali mengalami peningkatan sebesar US\$ 1,88 miliar. Menurut Rugman (dalam Filatotchev et.al, 2014) PMA dipengaruhi variabel lingkungan dan variabel internalisasi. Selain itu, kontribusi PMA pada pertumbuhan ekonomi tergantung pada kondisi sosial ekonomi dan kualitas lingkungan dari negara yang menerima (Wang dalam Oji-Okoro & Ofori, 2014).

Menurut ASEAN Secretariat (2007) Indonesia termasuk dalam empat negara tujuan PMA terbesar di ASEAN. Undang-undang Nomor. 25 Tahun 2007 sebagai wujud strategi Indonesia menuju rezim investasi yang bebas dan terbuka. Tercatatnya Indonesia sebagai *front-runners* sebelum terjadinya krisis 1997/1998 (World Investment Report, 2007). Pengalaman tersebut merupakan peluang Indonesia termasuk Kaltim untuk merealisasikan keunggulannya guna menarik PMA yang lebih tinggi.

BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur melakukan upaya pertambahan nilai produk melalui pembangunan Kawasan Industri Kariangau dan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy, meningkatkan kemampuan bersaing pelaku bisnis dengan menciptakan produk-produk unggulan yang mampu bersaing di pasar global. Peningkatan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik, komunikasi, dan birokrasi yang menetapkan *good governance* (Bappeda Kaltim, 2014).

Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti dalam wawancara pendahuluan yang telah dilakukan tanggal 8 November 2014, peneliti memperoleh data dari Bapak Diddy Rusdiansyah selaku Kepala BPPMD Provinsi Kalimantan Timur. Menurut data yang diberikan informan, upaya BPPMD dalam meningkatkan aliran PMA di Provinsi Kalimantan Timur melalui peningkatan investasi terutama pada produk unggulan daerah, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta proses perizinan cepat dalam memulai usaha.

Semua faktor diatas merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menarik investasi asing. Agar terciptanya implementasi MEA 2015 sukses dilaksanakan, harus disertai kebijakan dan pelengkap program utama di tingkat nasional (Aldaba, 2012). Berdasarkan data BKPM, Kaltim bahkan memperoleh peringkat kedua dalam realisasi PMA sebesar US\$ 0,8 miliar (vivanews.com, 2014). Indikasi perbaikan kinerja PMA sudah terlihat, tantangan Indonesia termasuk Kaltim untuk aliran masuk PMA masih relatif berat.

Kendala yang dihadapi provinsi Kalimantan Timur dalam menghadapi MEA: (1) Kualitas SDM yang masih rendah, disebabkan oleh kemandirian SDM lokal menjadi kendala utama, SDM Kaltim belum mampu memberi nilai tambah terhadap sumber daya alam yang dihasilkan, lapangan kerja dipenuhi oleh SDM dari luar Kaltim (migran); (2) Fasilitas infrastruktur yang masih rendah, disebabkan oleh pembangunan infrastruktur terkendala perizinan penggunaan kawasan hutan, akses antar wilayah terbatas, masih banyak daerah yang diakses menggunakan perahu (Kompas, 2014 & Bappeda Kaltim, 2015).

Berdasarkan penjelasan yang dijabarkan, maka ditetapkanlah rumusan masalah, Bagaimanakah kebijakan persiapan pemerintah dalam pembebasan aliran penanaman modal asing di provinsi Kalimantan Timur menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015?

B. TINJAUAN TEORI

Ekonomi Internasional

Ekonomi internasional merupakan ilmu yang mempelajari hubungan ekonomi yang berbeda antar satu negara dengan negara lainnya melalui alokasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia (Chacholiades, 1990:4). Hubungan ekonomi internasional dilakukan melalui perdagangan, investasi, hutang, serta kerjasama internasional (Nopirin, 2013:1).

Timbulnya hubungan ekonomi internasional baik berupa perdagangan ataupun investasi menyebabkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Secara keseluruhan hubungan ekonomi internasional terjadi karena adanya keuntungan yang diperoleh antar negara (*gains of trade*) (Krugman & Obstfeld, 2003:4).

Dasar teori yang menjelaskan timbulnya perdagangan internasional adalah *absolute advantage* dan *comparative advantage*. *Absolute advantage* merupakan teori klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith. Smith menerapkan ide tentang aktivitas ekonomi dalam sebuah negara dengan melakukan spesialisasi dan tukar-menukar dengan negara lain agar memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional (Appleyard & Field, 1998; Nopirin, 2013:10)

Sedangkan teori *comparative advantage* yang dikemukakan oleh David Ricardo menyatakan *comparative advantage* merupakan konsep yang sangat penting dalam ekonomi, karena menyajikan dasar tentang perdagangan antar individu dan perdagangan antar negara (Lynch, Watts & Wentworth, 2003:15). Menurut Ricardo yang disampaikan dalam (Nopirin, 2013:14) bahwa perbedaan keunggulan komparatif antar negara yang menimbulkan perdagangan internasional. *Comparative advantage* tercapai jika negara mampu memproduksi barang atau jasa lebih banyak dan lebih murah dari negara lain

Integrasi Ekonomi

Menurut (Appleyard & Field, 1998:353) integrasi ekonomi adalah penggabungan dua negara atau lebih untuk membentuk kerjasama ekonomi yang lebih besar diantara negara anggota. Integrasi ekonomi dalam arti luas merupakan penyatuan ekonomi yang berbeda kedalam ekonomi tunggal yang lebih besar dengan kebijakan yang telah ditetapkan bersama (Ellsworth & Leith, 1990:205).

Integrasi ekonomi pertama kali diusulkan oleh Bela Balassa pada tahun 1961. Ballasa membedakan teori integrasi ekonomi dalam konsep dinamis melalui penghapusan diskriminasi diantara negara anggota berbeda, sedangkan dalam konsep statis dengan melihat ada tidaknya perbedaan dalam diskriminasi. Selain itu, Timbergen berpendapat integrasi ekonomi sebagai bentuk penghapusan diskriminasi dan kebebasan bertransaksi (Arifin et.al, 2008:25).

Menurut Pelkman dalam Arifin et.al(2008:32) pendekatan tahapan integrasi yang digunakan secara luas adalah tahapan integrasi Balassa. Tahapan integrasi Balassa dibagi dalam 6 tahap sebagai berikut:

Tabel 1. Tahapan Integrasi Bela Balassa

Tahapan	Keterangan
<i>Preferential Trading Area (PTA)</i>	Blok perdagangan yang memberikan keistimewaan untuk produk-produk tertentu dari negara tertentu dengan melakukan pengurangan tarif namun tidak menghilangkan sama sekali.
<i>Free Trade Area (FTA)</i>	Suatu kawasan dimana tarif dan kuota antar negara anggota dihapuskan, namun masing-masing negara tetap menerapkan tarif mereka masing-masing terhadap negara bukan anggota.
<i>Custom Union (CU)</i>	Merupakan FTA yang meniadakan hambatan pergerakan komoditi antarnegara anggota dan menerapkan tarif yang sama terhadap negara bukan anggota.
<i>Common Market (CM)</i>	Merupakan CU yang juga meniadakan hambatan-hambatan pada pergerakan faktor-faktor produksi (barang, jasa, dan aliran modal). Kesamaan harga dari faktor-faktor produksi diharapkan dapat menghasilkan alokasi sumber yang efisien.
<i>Economic Union (EU)</i>	Merupakan suatu CM dengan tingkat harmonisasi kebijakan ekonomi nasional yang signifikan (termasuk kebijakan struktural).
<i>Total Economic Integration</i>	Penyatuan moneter, fiskal, dan kebijakan sosial yang diikuti dengan pembentukan lembaga supranasional dengan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh negara anggota.

Sumber: Arifin et.al (2008:33)

Free Trade Area (FTA)

Menurut Oxley (1990:194) perdagangan bebas melakukan aturan dan fungsi yang sama pada perdagangan internasional sebagai hukum kompetisi ekonomi dalam negeri. Pertimbangan logis yang menjadikan dasar adalah efisien. Jika tidak terdapat hambatan dalam perdagangan, produk impor dapat dijual pada pasar.

Kesepakatan *Free Trade Area*, negara diizinkan dalam perdagangan barang dan jasa melintasi batas negara melalui penghapusan hambatan tarif dan non tarif diantara negara anggota (Gerber, 2008:23). Setiap negara anggota memudahkan kebijakan perdagangan antar negara anggota. Tetapi, tidak melanggar kedaulatan masing-masing negara (Satria & Wulandari, 2011).

Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Awal dibentuknya ASEAN terdiri dari 5 negara di Asia Tenggara: Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Dibentuknya ASEAN guna pencapaian kedamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara (Sangwichitr, 2014). Bergabungnya Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Laos dan Myanmar (1997), dan Cambodia (1999), sehingga saat ini negara anggota ASEAN menjadi sepuluh negara (ASEAN Secretariat, 2014).

Kerjasama regional semakin diperkuat dengan stabilitas ekonomi dan sosial di kawasan Asia Tenggara, melalui percepatan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan budaya, serta memperhatikan kesetaraan dan kemitraan (Arifin et.al, 2008). Menurut Chia dalam Sangwichitr (2014) pendorong kekuatan utama pengembangan dan pertumbuhan ekonomi ASEAN adalah perdagangan dan investasi.

Tantangan regional yang dihadapi, termasuk krisis ekonomi 1997/1998 akibat devaluasi mata uang Baht oleh pemerintah Thailand. Para pemimpin ASEAN kembali merumuskan "ASEAN *Vision 2020*" tahun 1997 di Kuala Lumpur yang menjadi tujuan jangka panjang ASEAN. Rencana jangka panjang pembentukan ASEAN Community ini terdiri dari tiga pilar, yaitu: (1) ASEAN *Socio-cultural Community* (ASCC) (berfokus pada kerjasama sosial budaya daerah); (2) ASEAN *Security Community* (ASC) (berfokus pada kerjasama politik dan keamanan regional); (3) ASEAN *Economic Community* (AEC atau Masyarakat Ekonomi ASEAN) (berfokus pada integrasi ekonomi regional).

Menurut Thanadsillapakul dalam Booppanon(2008) visi ini sejalan dengan pendekatan regional, dimana antar negara anggota ASEAN menerapkan regionalisme terbuka dan bekerjasama untuk meningkatkan integrasi ekonomi global. Ide MEA pertama kali diusulkan oleh Perdana

Menteri Singapura Goh Chok Tong dalam ASEAN *Summit* di Phnom Penh, Cambodia (Hew dan Soesastro, 2003).

Pembentukan MEA berawal dari kesepakatan para pemimpin ASEAN pada ASEAN *Summit* tahun 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. MEA merupakan konsep yang mulai digunakan dalam *Declaration of ASEAN Concord II* (Bali *Concord II*) di Bali tahun 2003. MEA adalah tujuan akhir dari integrasi ekonomi seperti yang diuraikan dalam ASEAN *Vision 2020* (Plummer, 2006).

12th ASEAN *Summit* di Singapura tahun 2003 memutuskan percepatan MEA menjadi 2015. Keputusan ini dilakukan guna memperkuat daya saing ASEAN dalam menghadapi kompetisi global, terutama dari China dan India. Kemudian 13th ASEAN *Summit* (*Cebu Declaration*) tahun 2007 dilanjutkan dengan penandatanganan Piagam ASEAN (ASEAN *Charter*) sebagai langkah ASEAN guna memperkuat integrasi ekonomi.

Bersamaan dengan penandatanganan ASEAN *Charter*, ASEAN mengadopsi cetak biru MEA sebagai rencana induk untuk menciptakan MEA pada tahun 2015 (Sangwichitr, 2014). Cetak biru MEA dipublikasi guna mempercepat pencapaian MEA dan menciptakan ASEAN sebagai kawasan yang kompetitif, terintegrasi ekonomi global yang memiliki basis produksi pasar tunggal yang ditandai dengan pembangunan ekonomi yang adil (Goh dalam Bhattacharyay, 2010). Dengan adanya MEA, diharapkan ASEAN memiliki empat karakteristik atau pilar utama, yaitu: (1) Pasar tunggal dan basis produksi internasional; (2) Kawasan ekonomi yang berdaya saing; (3) Pertumbuhan ekonomi yang merata; (4) Kawasan integrasi penuh dengan perekonomian global.

Penanaman Modal Asing (*Foreign Direct Investment*)

Perpindahan modal antar negara mengambil bentuk yang berbeda berupa penanaman modal asing langsung (*foreign direct investment*). PMA didefinisikan sebagai investasi yang dilakukan oleh perusahaan di negara lain dengan tujuan mengendalikan pengoperasian perusahaan di negara lain tersebut (Krugman & Obstfeld, 2003:204; UNCTAD dalam Arifin et.al, 2008:175).

PMA mempunyai karakteristik yang lebih baik dibanding jenis aliran modal portofolio, yaitu relatif lebih stabil dan berkontribusi dalam proses produksi. Selain itu, manfaat PMA menurut (Satria dan Wulandari, 2011) adalah sebagai berikut: (1) PMA dapat menutup kekurangan modal domestik; (2) PMA meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi masalah pengangguran; (4) PMA meningkatkan devisa negara melalui peningkatan ekspor.

Kebijakan Liberalisasi Investasi

Liberalisasi investasi menyatukan berbagai efek positif pada arus masuk investasi, transfer teknologi, ekspor, serta pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Jarvis, 2009). Menyadari akan pentingnya dana investasi sebagai komponen dalam pembangunan dan pertumbuhan kawasan ASEAN, negara anggota melakukan berbagai reformasi atas rezim investasi.

Menurut (Birkland, 2011) kebijakan adalah pernyataan oleh pemerintah untuk melakukan suatu hal, seperti hukum, pengaturan, keputusan, perintah, atau kombinasi dari keseluruhan. Tujuan dari kebijakan ialah sebagai pendekatan yang dilakukan guna merealisasikan tujuan.

Liberalisasi investasi merupakan proses dimana investasi asing dapat bergerak tanpa ada hambatan dengan kepastian hukum yang jelas baik berupa penyediaan kemudahan untuk berinvestasi, insentif investasi dan lain-lain. Hal ini dilakukan guna menarik investor untuk menanamkan modal pada suatu negara (Krugman, Obstfeld & Melitz, 2012:537).

Keterkaitan kebijakan terhadap liberalisasi investasi adalah bagaimana kebijakan tersebut dapat mendukung kelancaran dalam menjalankan liberalisasi investasi. Dimana liberalisasi investasi dapat mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara (Jarvis, 2009).

C. METODE PENELITIAN

Babbie (2005:414) mendefinisikan penelitian kuantitatif adalah merepresentasikan data numerik yang berasal dari observasi dengan tujuan mendeskripsikan fenomena dari hasil observasi. Unit analisis yang ditetapkan dalam penelitian adalah kebijakan PMA, proses perizinan dalam memulai bisnis (*time/cost starting a new business*), insentif investasi, fasilitas infrastruktur, promosi, *national treatment*, perlindungan *intellectual property rights*, tarif pajak, tingkat korupsi yang rendah, kualitas birokrasi, Kawasan Ekonomi Khusus, kebijakan lingkungan, dan penyelesaian sengketa (Aldaba, 2012; Asiedu, 2001; Aqeel, 2005; *Australian Trade Commission*, 2014; Banga, 2003; Castro, Fernandes & Campos, 2013; Egger, Jebberger & Larch, 2011; Kobrin, 2004; Sahoo, 2006; Sampayo & Brito, 2004; Tsen, 2005; Utama & Peridy, 2009; Wei, 2000).

Sumber data sekunder dan primer digunakan dalam penelitian ini, sebagaimana menurut Bungin (2005) data sekunder adalah data yang bukan diperoleh dari sumber utama. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dirancang sesuai dengan tujuan (Azwar, 1998). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif.

Analisis data dengan teknik analisis deskriptif menggunakan statistik deskriptif. Menurut Pelosi & Sandifer (2003) statistik deskriptif digunakan untuk meringkas data agar memudahkan dalam penyajian informasi. Metode *scoring* merupakan teknik analisis data kuantitatif yang digunakan untuk memberikan nilai pada masing-masing karakteristik parameter dari sub-sub variabel agar dapat dihitung nilainya, serta menghitung perolehan peringkat (Johnson, 1992:690). Langkah-langkah *scoring* pemberian nilai pada 14 determinan yang telah ditetapkan dilakukan dengan cara perhitungan persentase untuk mengetahui skor pada masing-masing determinan. Pemberian nilai dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Pemberian Nilai pada Determinan

No.	Determinant of FDI	
1.	Kebijakan PMA	$\frac{100}{14} = 7,14\%$ <p>7,14 persen merupakan skor pada masing-masing determinan</p>
2.	Insentif Investasi	
3.	Fasilitas Infrastruktur	
4.	Promosi	
5.	National Treatment	
6.	Perlindungan <i>Intellectual Property Rights</i>	
7.	Tarif pajak	
8.	Tingkat korupsi yang renda	
9.	Kualitas Birokrasi	
10.	Kawasan Ekonomi Khusus	
11.	Kebijakan lingkungan	
12.	Penyelesaian sengketa	
13.	Proses perizinan dalam memulai bisnis	
14.	Transparansi kebijakan dan informasi pemerintah	

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2015

Kemudian dilakukan perbandingan dengan tujuan mengetahui perbandingan persiapan provinsi Kalimantan Timur dengan provinsi lainnya dalam menuju MEA 2015. Penetapan provinsi Jawa barat dan DKI Jakarta berdasarkan data peringkat realisasi PMA tertinggi yang disampaikan dalam [websitewww.bkpm.go.id](http://www.bkpm.go.id) (BKPM, 2015). Langkah-langkah *scoring* dan perbandingan antar provinsi:

Gambar 2. Langkah-langkah *Scoring* dan Perbandingan Antar Provinsi



Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2015

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil *scoring* dan perbandingan antar provinsi, diperoleh hasil bahwa Provinsi Kalimantan Timur belum siap menuju MEA 2015. Hal ini disebabkan karena determinan yang mempengaruhi PMA yang belum dipenuhi oleh Provinsi Kalimantan Timur, seperti: (1) Insentif investasi, (2) Fasilitas infrastruktur, (3) Perlindungan *Intellectual Property Rights*, dan (4) Tingkat korupsi yang rendah.

Tabel 3. Hasil *Scoring* dan Perbandingan Kebijakan Pembebasan Aliran PMA Antar Provinsi

No.	Determinants of FDI	Kalimantan Timur	Jawa Barat	DKI Jakarta	Indonesia (Nasional)
1.	Kebijakan Penanaman Modal Asing	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%

	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan jelas, dapat di implementasikan. - Memiliki ketentuan umum. 	Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2014 tentang RUPM 2014-2025			
		Tabel 3 (lanjutan)			
	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki asas dan tujuan. - Memiliki petunjuk pelaksanaan (Juklak). - Memiliki petunjuk teknis (Juknis). 				
2.	<p>Insentif investasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah. - Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah. - Pemberian dana stimulan. 	0	7,14%	7,14%	7,14%
3.	<p>Fasilitas infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Infrastruktur keras, seperti: jalan raya, pelabuhan laut, pelabuhan udara, saluran irigasi. - Infrastruktur keras non-fisik seperti: telekomunikasi (jaringan telepon dan internet), listrik, dan pasokan energi minyak bumi, biodiesel, dan gas. - Infrastruktur lunak, seperti: kerangka institusional yang meliputi nilai (termasuk etos kerja), norma, kualitas pelayanan umum yang disediakan khususnya pemerintah. 	0	7,14%	7,14%	0
4.	<p>Promosi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan peluang dan potensi daerah. - Koordinasi promosi penanaman modal. - Meningkatkan persaingan pelaku bisnis untuk menciptakan produk unggulan. 	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%
		Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Timur 2014-2025			
5.	<p>National treatment</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlakuan tanpa membedakan asal negara. - Pelayanan non diskriminasi. 	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%
		Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Timur 2014-2025			
6.	<p>Perlindungan Intellectual Property Rights</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendukung dan memajukan 	0	7,14%	7,14%	7,14%

	kesejahteraan.				
		Tabel 3 (lanjutan)			
	- Kreator Indonesia mampu berkompetisi secara internasional.				
7.	Tarif pajak - Pembebasan/penangguhan pajak pertambahan nilai atas impor barang modal yang belum dapat di produksi di dalam negeri. - Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan. - Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal.	7,14% Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	7,14%	7,14%	7,14%
8.	Tingkat korupsi rendah - Pengembangan zona integritas. - Reformasi Birokrasi. - Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.	0	7,14%	0	0
9.	Kualitas birokrasi - Tugas pokok dan fungsi. - Reformasi birokrasi. - Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.	7,14% Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah	7,14%	0	7,14%
10.	Kawasan Ekonomi Khusus - Mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu. - Menjaga keseimbangan kemajuan daerah. - Lokasi strategis.	7,14% Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2014 tentang Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan	7,14%	7,14%	7,14%
11.	Kebijakan lingkungan - Ketentuan-ketentuan pokok guna terciptanya pengendalian kondisi lingkungan. - Industri yang melakukan kegiatan yang berdampak pada lingkungan wajib melakukan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).	7,14% Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	7,14%	7,14%	7,14%

Tabel 3 (lanjutan)					
12.	Penyelesaian sengketa - Musyawarah dan mufakat. - Arbitrase. - Pembinaan melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal. - Pengendalian dan pengawasan penanaman modal.	7,14% Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 32	7,14%	7,14%	7,14%
13.	Proses perizinan memulai bisnis - Pelayanan Terpadu Satu Pintu. - Menetapkan standar pelayanan publik. - SOP yang ketat memberikan waktu pelayanan yang jelas. - Dilengkapi persyaratan fasilitas minimal yang diatur dalam Undang-undang Pelayanan Publik. - Sistem layanan perizinan berbasis IT.	7,14% Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7,14%	7,14%	7,14%
14.	Transparansi Kebijakan dan Informasi Pemerintah - Menjalankan asas keterbukaan informasi melalui <i>website</i> . - Sosialisasi kebijakan.	7,14% Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	7,14%	7,14%	7,14%
Total		71,40%	99,96%	85,68%	85,68%

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2015

Pembandingan Kebijakan Pembebasan Aliran PMA Antar Provinsi

Berdasarkan hasil pembandingan antar provinsi yang dilakukan, disimpulkan bahwa Provinsi Jawa Barat siap menuju MEA 2015 dengan perolehan pembobotan sebesar 99,96 persen. Kesiapan Provinsi Jawa Barat dalam menuju MEA 2015 disebabkan oleh kebijakan pembebasan aliran PMA yang ditetapkan memenuhi tujuan. Menurut Aldaba (2012) agar terciptanya implementasi MEA 2015 sukses dilaksanakan harus disertakan kebijakan serta pelengkap program utama di tingkat nasional.

Berdasarkan hasil pembandingan antar provinsi yang dilakukan, terdapat beberapa perbedaan kebijakan antar provinsi yang ditetapkan berkaitan dengan pembebasan aliran PMA adalah sebagai berikut:

1. Insentif Investasi

Pemberian insentif investasi di Provinsi Jawa Barat diatur dalam Pergub No. 48 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal. Dijelaskan dalam pasal 29 bahwa bentuk pemberian investasi berupa: (1) Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Pajak Daerah, (2) Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Retribusi Daerah, (3) Pemberian dana stimulan untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi, serta (4) Pemberian bantuan modal untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi.

Pemberian insentif investasi di Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Pergub No. 22 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal menyediakan pemberian kemudahan dan insentif investasi berupa: (1) Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Pajak Daerah, (2) Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Retribusi Daerah, (3) Pemberian dana stimulan, serta (4) Pemberian bantuan modal.

2. Fasilitas Infrastruktur

Fasilitas infrastruktur di Provinsi Jawa Barat terus mengalami peningkatan. Berdasarkan Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (2015), pengembangan fasilitas wilayah atau infrastruktur mengalami peningkatan sejak tahun 2012 sehingga mendukung iklim investasi. Asiedu (2001) berpendapat fasilitas infrastruktur merupakan faktor pendukung iklim investasi serta dapat menarik minat investor.

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi percontohan dalam pembangunan infrastruktur. Kawasan Jawa Barat menjadi salah satu tujuan investasi berbagai pemodal asing di bidang industri. Iklim investasi yang kondusif tidak terlepas dari faktor kepastian hukum serta birokrasi yang efektif dan efisien (Kementerian Perindustrian, 2015).

Menurut Pasaribu dalam Kajian Penelitian INDEF (2012) ketersediaan infrastruktur sebagai koneksi dalam negeri masih sangat minim. Fasilitas infrastruktur di Indonesia masih sebesar 2 persen (Kementerian Keuangan, 2015). Minimal fasilitas infrastruktur 5 persen dari PDB yang dimiliki negara (*Asian Development Bank* dalam Kementerian Keuangan, 2015)

3. Perlindungan Intellectual Property Rights

Menurut Simatupang (2007) Provinsi Jawa Barat menyediakan sumber pendukung industri kreatif dengan baik. Generasi muda yang kreatif dan berani bereksperimen dengan gagasan inovatif, selain itu Jawa Barat dikenal sebagai pusat tekstil, mode, kriya, dan seni. Kota Bandung sebagai pusat promosi budaya termasuk perintis perfilman Indonesia.

Sumber pendukung industri kreatif berupa kebijakan yang memajukan kesejahteraan, dan mendukung kreator mampu bersaing secara internasional. Kebijakan *Intellectual Property Rights* di Jawa Barat diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual. Hal ini mendorong peningkatan kreativitas dan inovasi masyarakat Jawa Barat.

4. Tingkat Korupsi yang Rendah

Tingkat korupsi di Provinsi Jawa Barat tergolong rendah, hal ini disebabkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Jawa Barat melakukan indeksasi pada persepsi korupsi sebagai upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi (Bappeda Jabar, 2013). Penetapan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebagai indikator dalam penerapan transparansi dalam akuntabilitas daerah (*Transparency International*, 2010).

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembebasan aliran PMA merupakan hal penting dalam mendukung liberalisasi investasi. Perolehan peringkat ketiga atas realisasi PMA pada Provinsi Kalimantan Timur merupakan bukti bahwa liberalisasi investasi dapat mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di suatu negara (Jarvis, 2009).

Keunggulan komparatif yang dimiliki Provinsi Kalimantan Timur guna menarik minat investor asing dalam menanamkan modal tidak cukup menggambarkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur siap menuju MEA 2015. Diperlukan kebijakan sebagai pendekatan guna merealisasikan tujuan (Birkland, 2011). Terdapat empat determinan yang mempengaruhi PMA yang belum dipenuhi provinsi Kalimantan Timur:

1. Insentif investasi

Insentif investasi merupakan rangsangan yang ditawarkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk merangsang investasi pada sektor swasta (Hurber, 1982). Rangsangan investasi yang diberikan dapat berupa bantuan modal, pembebasan pajak, atau mengusahakan infrastruktur (Krugman, Obstfeld & Melitz, 2012:537). Namun insentif investasi di Provinsi Kalimantan Timur hanya menerapkan keringanan pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Fasilitas Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur secara merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan daya tarik PMA, infrastruktur yang baik dapat memperluas dan mempercepat pembangunan serta pertumbuhan ekonomi (Bappeda Kaltim, 2015).

Permasalahan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Timur pada konektivitas jalan, karena mengalami kendala pada perizinan kawasan hutan. Menurut de Castro, Fernandes & Campos (2013) negara memerlukan fasilitas infrastruktur yang baik sebagai indikator dasar untuk menarik investor asing.

3. Perlindungan *Intellectual Property Rights* (IPR)

Menurut Antariksa dalam kajian Kemenparekraf (2011), *Intellectual Property Rights* dikenal sejak munculnya industri kreatif. Industri kreatif pada Provinsi Kalimantan Timur masih relatif rendah, karena mayoritas investor menanamkan modal pada bidang tambang, perkebunan kelapa sawit, dan tanaman industri.

Pemahaman masyarakat Indonesia tentang *Intellectual Property Rights* masih sangat minim. IPR memacu perusahaan domestik untuk mengembangkan produk baru yang lebih baik (Wu, 2000). IPR memberikan kualitas ekspor yang baik serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

4. Tingkat Korupsi yang Rendah

Korupsi yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap daya tarik PMA sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Mauro, 1995; Melo & Quinn, 2015). Tingkat korupsi pada Provinsi Kalimantan Timur masih tinggi, akibat praktek suap yang dilakukan untuk mengamankan proyek pemerintah (Transparency International, 2015).

Terkait dengan hal tersebut masih indikatif dan belum ada pembuktian. Menurut Quazi, Vemuri, dan Soliman (2014) tingkat korupsi yang rendah meningkatkan kepercayaan investor asing dalam berinvestasi di suatu negara, dan pada akhirnya akan meningkatkan arus masuk PMA.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil *scoring* dan perbandingan yang dilakukan dalam penelitian ini, provinsi Kalimantan Timur memperoleh skor sebesar 71,40 persen. Disimpulkan bahwa provinsi Kalimantan Timur belum siap menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Sebagaimana menurut Patton, Sawicki & Clark (2013) kebijakan yang baik adalah kebijakan yang memenuhi *goals* (tujuan).

Provinsi Kalimantan Timur belum siap menuju MEA 2015 disebabkan oleh beberapa kebijakan terkait dengan pembebasan aliran PMA belum dapat terpenuhi, seperti: (1) Insentif investasi hanya memberikan keringanan pajak dan retribusi daerah; (2) Fasilitas infrastruktur yang masih rendah karena pembangunan belum merata; (3) Perlindungan terhadap *Intellectual Property Rights* yang masih rendah akibat minimnya industri kreatif; (4) Tingkat korupsi yang masih tinggi akibat praktek suap yang dilakukan untuk mengamankan proyek pemerintah.

Saran Akademis

1. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar penelitian berikutnya lebih memperdalam penelitian menjadi eksplanatif. Penelitian eksplanatif dapat memberikan saran yang tepat pada sasaran

Saran Praktis

1. Pemberian insentif investasi dapat dilakukan secara selektif dengan menetapkan investor tepat serta memprioritaskan berdasarkan pada sektoral. Pemberian insentif diimbangi dengan manfaat ekonomi yang lebih besar setelah proyek berjalan, seperti menciptakan lapangan kerja baru atau meningkatkan volume ekspor.
2. Memperluas keikutsertaan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur agar memenuhi fasilitas infrastruktur serta mempercepat pembangunan infrastruktur.
3. Provinsi Kalimantan Timur dapat belajar dari provinsi Jawa Barat yang menyediakan sumber pendukung industri kreatif yang baik, serta mengatur perlindungan terhadap kekayaan intelektual agar mendorong kreatifitas dan inovasi masyarakat di Kalimantan Timur. Merancang kegiatan *matchmaking* dengan investor potensial agar membangun hubungan bisnis yang berkelanjutan di sektor industri kreatif, sehingga membangun membawa arus dana yang dibutuhkan serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat
4. Disarankan agar provinsi Kalimantan Timur melakukan indeksasi pada persepsi korupsi. Menetapkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebagai indikator kepercayaan para pelaku bisnis terhadap penerapan transparansi dan akuntabilitas daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2014. Key indicators of ease of doing business-2014. *Australian Trade Commission*.
- Aldaba, Rafaelita. M. 2012. Investment liberalization and facilitation toward AEC 2015. Philippine: *Philippine Journal of Development* Vol. 39, Page 69-93.
- Akbar, Tofler dan Wibowo. 2014. *Ini 5 Daerah Unggulan Investasi di Indonesia*. <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/499689-ini-5-daerah-unggulan-investasi-di-indonesia>, diakses 25 Oktober 2014 Pukul 09.45 WIB.
- Appleyard, Dennis R. & Alfred J. Field. 1998. *International Economics Trade Theory and Policy. Third Edition*. United States: Irwin/McGraw-Hill
- Arifin, Sjamsul, Rizal A. Djaafara, dan Aida S. Budiman. 2008. *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Memperkuat Sinergi di Tengah Kompetisi Global*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- ASEAN Secretariat. 2014. *Overview*. <http://www.asean.org/asean/about-asean/overview>, diakses 24 November 2014 pukul 11.03 WIB.
- ASEAN Secretariat. 2014. *ASEAN Economic Community*. <http://www.asean.org/communities/asean-economic-community>, diakses 24 November 2014 Pukul 13.01 WIB.
- ASEAN Secretariat. 2014. *ASEAN InvestmentArea (AIA) Council*. <http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/category/asean-investment-area-aia-council>, diakses 26 November 2014 Pukul 12.52 WIB.
- Asiedu, Elizabeth. 2001. On the determinants of foreign direct investment to developing country: Is Africa different?. Elsevier Science Ltd: *World Development* Vol. 30, (No. 1): 107-119.
- Aqeel, Anjum. 2005. The determinants of foreign direct investment in Pakistan. Karachi: University of Karachi.
- Azwar, Dr. Saifuddin. 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Babbie, Earl. 2013. *The Practice of Social Research, Thirteen Edition, International Edition*: Wadsworth, Cengage Learning.
- Banga, Rashmi. 2003. Impact of government policies and investment agreements on foreign direct investment inflow. New Delhi: *Indian Council for Research on International Economic Relation*, Working paper No. 116.
- Bappeda Kaltim. 2014. *Kaltim Harus Siap Hadapi Pasar Bebas ASEAN*. <http://www.kaltimprov.go.id/berita-2510-kaltim-harus-siap-hadapi-pasar-bebas-asean-2015.html>, diakses 18 November 2014 Pukul 13.29 WIB.
- Booppanon, Sarasin. 2008. The effects of bilateral and regional investment agreements on the FDI inflows into ASEAN countries. United States: *George Mason University, ProQuest, UMI Dissertations Publishing*, 2008. 3289700.
- Bhattacharyay, Biswa Nath. 2010. Infrastructure for ASEAN connectivity and integration. Singapore: *ASEAN Economic Bulletin* Vol. 27: 200-220.
- Birkland, Thomas A. 2011. *An Introduction to the Policy Process (Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making)*. Third Edition. United States: M. E. Sharpe, Inc.
- BPPMD Kaltim. 2014. *Realisasi Investasi Kaltim Triwulan 1/2014 Didominasi PMA*. <http://bppmd.kaltimprov.go.id>. Diakses 20 Oktober 2014 Pukul 09.00 WIB.
- BPPMD Kaltim. 2014. *Keunggulan Kompetitif Kunci Kaltim Hadapi MEA 2015*. <http://bppmd.kaltimprov.go.id>, diakses 20 Oktober 2014 jam 09.25 WIB.

- BPPMD Kaltim. 2014. *Karet dan Kakao Jadi Unggulan Investasi Kaltim*. <http://bppmd.kaltimprov.go.id>, diakses 12 November 2014 Pukul 10.04 WIB.
- BPPMD Kaltim. 2014. *BPPMD Memasarkan Pelabuhan Internasional Maloy*. <http://bppmd.kaltimprov.go.id>, diakses 12 November 2014 Pukul 10.09 WIB.
- BKPM RI. 2013. *Fact of Indonesia - Sound Economy*. <http://www.bkpm.go.id/contents/general/4/sound-economy#.VGK5DPmUeRY>, diakses 12 November 2014 Pukul 08.42 WIB.
- BKPM RI. 2014. *Domestic And Foreign Direct Investment Realization In Quarter III and January-September 2014*. <http://www.bkpm.go.id>, diakses 12 November 2014 Pukul 08.45 WIB.
- BKPM. 2014. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. <http://www.bkpm.go.id/>, diakses pada tanggal 22 Mei 2015 Pukul 9.53 WIB
- Chacholiades, Miltiades. 1990. *International Economics*. Singapore: McGraw-Hill.
- De Castro, Priscila Gomes, Elaine Aparecida Fernandes & Antonio Carvalho Campos. 2013. The determinants of fdi in Brazil and Mexico: an empirical analysis. *Procedia Economic and Finance* 5: 231-240.
- Egger, Peter, Christoph Jebberger, Mario Larch. Trade and investment liberalization as determinants of multilateral environmental agreement membership. *International Tax Public Finance* (2011) 18: 605-633.
- Ellsworth, P. T & J. Clark Leith. 1990. *The International Economy*. Sixth Edition. New York: Macmillan Publishing Company
- Filatotchev, Igor Strange, Roger Piesse, Jenifer & Yung-Chih Lien. 2007. FDI by firms from newly industrialised economies in emerging markets: corporate governance, entry mode and location. United Kingdom: *Journal of International Business Studies* Vol. 38: 556-572.
- Gerber, James. 2008. *International Economics. Fourth Edition*. Boston: Pearson Education Inc.
- Hurber, Richard Paul, Jr. 1982. The impact of fiscal incentives on Brazilian Northeast. Proquest, *UMI Dessertations Publishing 820954*. University of Illionis at Urbana-Champaign.
- Hew, Denis and Hadi Soesastro. 2003. Realizing the ASEAN economic community by 2020: ISEAS and ASEAN-ISIS approaches. Singapore: *ASEAN Economic Bulletin* Vol. 20, (No. 3): 292-296.
- Johnson, Robert, 1992. *Elementary Statistic*. Sixth Edition. California: Wadsworth, Inc.
- Kaltim Post. 2015. Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Jadi Solusi. <http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/225919-ekonomi-kreatif-dan-pariwisata-jadi-solusi.html>, diakses tanggal 22 Mei 2015 Pukul 13:21 WIB.
- Kementerian Perindustrian. 2015. Pemerintah Fokus Membenahi Infrastruktur Jawa Barat. <http://www.kemenperin.go.id/artikel/6419/Pemerintah-Fokus-Membenahi-Infrastruktur-Jawa-Barat>, diakses tanggal 23 Mei 2015 Pukul 8.27 WIB.
- Kementerian Keuangan RI. 2012. *Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>, diakses 4 November 2014 Pukul 14.19 WIB.
- Kobrin, Stephen J. 2004. The determinants of liberalization of FDI policy in developing countries: A cross-sectional analysis, 1992-2001. University of Pennsylvania
- KOMPAS. 28 November 2014. *Masyarakat Ekonomi ASEAN*, hlm. 56.
- Krugman, Paul. R dan Obstfeld, Maurice. 2005. *Ekonomi Internasional*. "Edisi Kelima". Jakarta: GRAMEDIA.
- Krugman, Paul R., Maurice Obtsfeld & Marc J. Melitz. 2012. *International Economics Theory & Policy. Ninth Edition*. England: Pearson Education Limited.
- Lynch, Gerald J., Michael W. Watts & Donald R. Wenworth. 2003. *Focus International Economics*. New York: National Council on Economic Education.
- Mankiew, N. Gregory. 2003. *Makroekonomi*. (5th edition). Jakarta: Erlangga.
- Melo, Luisa & Michael A. Quinn. 2015. Oil, foreign direct investment and corruption. *The International Journal of Business and Finance Research*, Vol. 9 No.1.
- Oji-Okoro Izuchukwu & Daniel Ofori. 2014. Why South-South FDI is booming: case study of China FDI in Nigeria. Pakistan: *Asian Economic and Financial Review* Vol. 3: 361-376.
- Oxley, Alan. 1990. *The Challenge of Free Trade*. London: Harvester Wheatsheaf.
- Patton, Carl V., David S. Sawicki, Jennifer J. Clark. 2013. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. USA: Pearson

- Plummer, Michael G. An ASEAN custom union?. Italy: *Journal of Asian Economics* 17 (2006) 923-938.
- Quazi, Rahim, Vijay Vemuri & Mostafa Soliman. 2014. Impact of corruption on foreign direct investment in Africa. *International Business Research*, Vol. 7 No. 4
- Sahoo, Pravakar. 2006. FDI in South Asia: policy, trends, impact, and determinants. Tokyo: *ADB Institute Discussion Paper* No. 56.
- Sampayo, Felipa Mello & Jose Brando de Brito. 2004. The locational determinants of the US multinationals activities. Banco de Portugal: *Economic Research Department*.
- Sangwichitr, Klangjai. 2014. Strategic investment and competition under uncertainty in the ASEAN/AEC: real options and game theory. San Diego: *UMI Dissertation Publishing*.
- Simatupang, Togar M. 2007. Ekonomi Kreatif: Menuju Era Kompetensi dan Persaingan Usaha Ekonomi Gelombang IV. <http://www.academia.edu/6867632>, diakses 23 Mei 2015 Pukul 8.57 WIB.
- Satria, Dias & Farah Wulandari. 2011. Aktualisasi nilai-nilai konstitusi dalam kebijakan perdagangan Indonesia di tingkat regional dan multilateral. *Jurnal of Indonesian Applied Economics* Vol. 5, (No. 2).
- Tempo. 2014. *Siapkan Masyarakat Sambut MEA (Edisi Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019)*. Jakarta: Majalah TEMPO.
- Tsen, Wong Hock. The determinants of FDI in the manufacturing industry of Malaysia. *Journal of Economic Cooperation* 26, 2 (2005) 91-110.
- Transparency International. 2014. Corruption Perceptions Index 2014. <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2014/12/06/corruption-perceptions-index-2014>, diakses pada tanggal 14 Juni 2015 pukul 20:06 WIB
- Transparency International. 2015. Indeks Persepsi Korupsi Kota-Kota Indonesia 2010. <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2010/11/11/indeks-persepsi-korupsi-kota-kota-indonesia-2010>, diakses 23 Mei 2015 pukul 10.54 WIB.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD). 2007. *World Investment Report 2007*. http://unctad.org/en/docs/wir2007_en.pdf, diakses 10 November 2014 Pukul 11.09 WIB.
- Uttama, Nathapornpan Piyaarekul & Nicolas Peridy. 2009. The impact of regional integration and third-country effects on fdi. *ASEAN Economic Bulletin* Vol. 26 No. 3 pp. 239-252.
- Uttama, Nathapornpan Piyaarekul. Investment promotion policy in potential border zone. Thailand: *Procedia Economics and Finance* 14 (2014) 615-623.
- Wei, Shang-Jin. 2000. Natural openness and good government. Cambridge: *National Bureau of Economic Research*, Working paper 7765.